

BAB 2

PERKEMBANGAN ORGANISASI 'AISYIYAH

WILAYAH JAWA BARAT

2.1 Sejarah Berdirinya Organisasi 'Aisyiyah Wilayah Jawa Barat

'Aisyiyah berkembang dan meluas ke seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya ke wilayah Jawa Barat yang mengalami pengaruh dari adanya organisasi 'Aisyiyah. Pendirian organisasi 'Aisyiyah di wilayah Jawa Barat tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai organisasi induk persyarikatan, sehingga 'Aisyiyah dan Muhammadiyah saling berkaitan antara satu sama lain. Keberadaan Muhammadiyah di Jawa Barat melalui dua jalur yaitu jalur utara melalui kota Jakarta dan selatan melalui Kota Garut. Diketahui bahwa Kota Garut merupakan tempat awal dari persebaran sekaligus pembuka pimpinan Muhammadiyah di Jawa Barat.²⁵

Pada tanggal 30 November 1923 berdasarkan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor 18 secara resmi berdirinya Muhammadiyah di Kota Garut.²⁶ H. M Djamhari, Wangsa Eri, Masjamah, dan H.M Ghazali Tusi sebagai tokoh perintis dari Muhammadiyah Garut. Persebaran Muhammadiyah dari Kota Garut menyebar ke kota-kota terdekat seperti Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, dan Cirebon. Selanjutnya setelah Cirebon Muhammadiyah menyebar ke daerah Indramayu dan Majalengka.

Selang beberapa tahun dari pendirian Muhammadiyah di Kota Garut, maka secara otomatis didirikannya 'Aisyiyah sebagai organisasi wanita

²⁵ Dikdik Dahlan, *Sang Surya di Tatar Sunda* (Bandung: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2005), hlm. 49.

²⁶ Ibid, hal.52.

Muhammadiyah cabang pertama pada tahun 1925.²⁷ Pendirian ‘Aisyiyah yang hanya selang dua tahun dari Muhammadiyah Kota Garut dipengaruhi oleh pendirian pimpinan pusat ‘Aisyiyah yang hanya berselang 8 tahun dari pendirian Muhammadiyah oleh K.H Ahmad Dahlan.

Pada awal perkembangannya, status awal ‘Aisyiyah semula sebagai pembantu pimpinan. Hal ini berdasarkan struktur pimpinan baik Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah hanya ada *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) dan *Afdeeling* (Pimpinan perwakilan). Dalam pergerakannya disebutkan bahwa pimpinan perwakilan tidak secara jelas keberadaannya dan hanya disebutkan yang mencakup wilayah di Indonesia dan pada tahun 1941 pada ‘Aisyiyah Daerah adanya pergantian dari pimpinan perwakilan menjadi cabang persyarikatan.²⁸

Pada saat pendirian ‘Aisyiyah di Kota Garut kedudukan ‘Aisyiyah masih sebagai pembantu pimpinan yang disebut sebagai “bagian” ‘Aisyiyah yang sejajar dengan majelis tabligh. Sehingga penyebutan ‘Aisyiyah sebagai majelis terus berlangsung. Pada tahun 1965 dilaksanakannya Mukhtamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung yang memutuskan penyempurnaan struktur pimpinan organisasi persyarikatan yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah yang mencakup provinsi, daerah di Kota/Kabupaten, cabang di Kecamatan dan Ranting di desa. Istilah yang digunakan pada saat itu adalah Pimpinan ‘Aisyiyah Wilayah (PAW), Pimpinan ‘Aisyiyah Daerah (PAD), terus berlanjut ke tingkat ranting.²⁹

²⁷ Fadjri, H.M. *Sedjarah Muhammadiyah Garut* (Garut: Pimpinan Muhammadiyah Garut, 1968), hal.12.

²⁸ Ibid, hal.31.

²⁹ Djaldan Badwi, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah, Himpunan Putusan Mukhtamar* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003), hlm.192.

Pada tanggal 22 Sya'ban 1388 H/ 16 Februari 1969 secara resmi berdirinya Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Jawa Barat.³⁰ Berdirinya Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat bersamaan dengan perubahan status istilah kepemimpinan dari yang awalnya pembantu pimpinan menjadi organisasi ortom dengan tidak memakai istilah konsulat atau majelis perwakilan pimpinan berubah menjadi pimpinan wilayah. Maka perwakilan-perwakilan Muhammadiyah kotamadya dan kabupaten berdasarkan hasil sidang Tanwir tahun 1966 berubah pula statusnya dari pimpinan cabang menjadi pimpinan daerah.

Semenjak kongres Muhammadiyah ke-11 tahun 1922 di Yogyakarta yang memutuskan bahwa setiap pendirian cabang Muhammadiyah wajib mengadakan bagian 'Aisyiya, maka 'Aisyiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anggota-anggota 'Aisyiyah tidak hanya gadis-gadis muda melainkan para wanita Muhammadiyah yang sudah berumah tangga dan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali anggota dari Muhammadiyah.³¹

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat bertugas untuk memimpin dan mengkoordinir setiap daerah, cabang, dan ranting yang ada pada lingkup wilayah Jawa Barat, selain itu wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat juga menyelenggarakan amal usaha dengan tujuan agar setiap daerah, cabang, dan ranting mempunyai *ghirah* (semangat) dalam melaksanakan dan mewujudkan visi misi 'Aisyiyah sebagaimana tujuan 'Aisyiyah adalah menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

³⁰ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, "Sejarah Perjalanan 'Aisyiyah Jabar.", diakses pada 21 Juni 2024.

³¹ Suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982), hlm.70-71.

2.2 Perkembangan Organisasi ‘Aisyiyah Wilayah Jawa Barat

‘Aisyiyah merupakan organisasi pergerakan wanita Muhammadiyah yang memiliki status yang paling komplis dari mulai sebagai bagian majelis tabligh, kemudian menjadi otonom dan otonom khusus Muhammadiyah. ‘Aisyiyah adalah organisasi ortom khusus yang berhak mengatur dan mengadakan amal usahanya sendiri. ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah memiliki tujuan yang sama dalam menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga segala amal usaha dan aktivitas ‘Aisyiyah meliputi dakwah syiar islam, mendirikan sekolah, mushola, memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadikan ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang bergerak aktif dalam masalah sosial masyarakat.

Status ‘Aisyiyah dalam tubuh organisasi Muhammadiyah berubah seiring pesatnya perkembangan ‘Aisyiyah dan mengikuti tuntutan zaman. Sesuai dengan intruksi dari keputusana Muktamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1953 di Purwokerto, memutuskan bahwa ‘Aisyiyah menjadi bagian dari Muhammadiyah dengan status otonom khusus. Seperti tercantum dalam anggaran pokok ‘Aisyiyah pada pasal 1 tahun 1956 berbunyi bahwa. *”‘Aisyiyah bahagian istimewa Muhammadiyah yang berkedudukan secara otonom. Organisasi ‘Aisyiyah dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah.”* bila dicermati terkait penggalan isi dari anggaran pokok ‘Aisyiyah yang memuat betapa pentingnya posisi dan peran ‘Aisyiyah.³² Sehingga setelah perubahan status menjadi otonom status struktur

³² Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2010),hal.354.

‘Aisyiyah menjadi lebih berjenjang dari tingkat pusat (nasional), wilayah (provinsi), daerah (kabupaten/kota), cabang(kecamatan) dan ranting (desa).

Sebagai organisasi otonom khusus Muhammadiyah yang berbeda dengan organisasi otonom Muhammadiyah lainnya seperti Nasyatul ‘Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hak-hak ‘Aisyiyah bertambah luas setelah ditetapkan menjadi organisasi otonom khusus diantaranya ‘Aisyiyah boleh menyelenggarakan anggaran dasar, pimpinan pusat, kartu anggota, dan ‘Aisyiyah berhak untuk mengadakan Mukatamar tersendiri dengan waktu yang bersamaan dengan Mukatamar Muhammadiyah. Namun kegiatan atau aktivitas ‘Aisyiyah harus tetap selaras dan sejalan dengan aktivitas dari Muhammadiyah sebagai organisasi Induk.

Pimpinan wilayah ‘Aisyiyah Jawa Barat terus mengalami perkembangan yang berpengaruh terhadap ‘Aisyiyah bagian daerah, cabang dan ranting yang ada di Jawa Barat. ‘Aisyiyah Wilayah Jawa Barat masih bertahan dan terus mengalami perkembangan dari berbagai aspek kehidupan melalui perwujudan amal usaha yang terselenggara. Perkembangan amal usaha Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Barat dimulai sejak tahun 23 Juni 1999 yang dipercaya mampu menyelenggarakan Akademi Keperawatan (AKPER) oleh Departemen Kesehatan RI. Akademi Keperawatan ‘Aisyiyah terletak di Jl. Banteng Dalam No. 6 Bandung, dengan penyelenggarannya dimulai sejak tahun 1972 dengan nama Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ‘Aisyiyah yang menghasilkan lulusan sebanyak 234 orang dari 9 angkatan. Pada tahun 2008 ‘Aisyiyah Jawa Barat juga menyelenggarakan Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah. Selain itu didirikan juga

sekolah menengah pertama dan Pesantren Puteri 'Aisyiyah Boording School yang berlokasi di Jalan. Terusan Rancagoong II nomor. 5 Bandung Jawa Barat.³³ Perwujudan amal usaha 'Aisyiyah Wilayah Jawa Barat disesuaikan dengan kondisi dari Pimpinan wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat yang telah mampu dalam mengelola dan mengatur amal usaha yang terselenggara, sekaligus sebagai bahan kajian agar setiap pimpinan daerah, cabang, maupun ranting juga dapat menyelenggarakan dan mengelola amal usaha tersebut.

³³ Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat, "Amal Usaha ;Aisyiyah". diakses tanggal 21 Juni 2024.